



Sejarah Transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999)

M. Rizal¹, Ahmal², Bunari³

^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

E-mail: m.rizal0845@student.unri.ac.id, ahmal@lecturer.unri.ac.id, bunari@lecturer.unri.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-14 Keywords: <i>History; Transmigration; Social and Economic.</i>	This research discusses the history of transmigration in Pulau Gadang Village, Kampar Regency (1992-1999). The aim of this research is to determine the background to the occurrence of transmigration in Pulau Gadang Village, Kampar Regency, the process of transmigration in Pulau Gadang Village, Kampar Regency and the impact of transmigration on the social and economic life of the people of Pulau Gadang Village, Kampar Regency (1992-1999). Considering that the event that is the subject of this research is a past event, the type of research used is historical research (historical method). The research results obtained show that transmigration in Pulau Gadang Village, Kampar Regency occurred on August 31 1992. This transmigration was caused by the construction of the Koto Panjang hydroelectric reservoir, Kampar Regency which caused the settlement of the Pulau Gadang Village community to sink. This transmigration was not as easy as the Kampar district government imagined. The first Social Engineering in 1983 and the second Social Engineering in 1990 proved that the people of Pulau Gadang Village lacked confidence in this program. The impact of this transmigration on the social and economic life of the Pulau Gadang Village community, such as education, health, customs, the social environment in agriculture and the economy of the Pulau Gadang Village community.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-14 Kata kunci: <i>Sejarah; Transmigrasi; Sosial dan Ekonomi.</i>	Penelitian ini membahas tentang Sejarah Transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar, Proses berjalannya transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar dan Dampak transmigrasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999). Mengingat peristiwa yang menjadi pokok penelitian ini adalah peristiwa masa lampau, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah (metode historis). Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwasanya transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar terjadi pada tanggal 31 agustus 1992. Transmigrasi ini disebabkan dengan adanya pembangunan waduk PLTA Koto Panjang kabupaten kampar yang menyebabkan tenggelamnya pemukiman masyarakat Desa Pulau Gadang. Transmigrasi ini tidaklah semudah yang dibayangkan oleh pemerintah kabupaten Kampar, Rekayasa Sosial pertama tahun 1983 dan Rekayasa Sosial kedua 1990 membuktikan bahwasanya kurang percayanya masyarakat Desa Pulau Gadang terhadap program ini. Dampak transmigrasi ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pulau Gadang, seperti pendidikan, kesehatan, adat istiadat, lingkungan sosial dalam pertanian dan terhadap perekonomian masyarakat Desa Pulau Gadang.

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia berawal dari zaman kolonisasi yaitu pada tahun 1905 ditandai dengan penempatan pertama sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari Kedu Jawa Tengah ke Gedong Tataan Provinsi Lampung. Istilah transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dalam harian Soeloeh Indonesia (Yudohusudo 1998). Sesudah masa Kemerdekaan Republik Indonesia rancangan pelaksanaan kolonisasi dilanjutkan lagi, tetapi penggunaan

istilah kolonisasi berubah menjadi transmigrasi. Pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1947, Soekarno berkeinginan untuk melakukan pemindahan penduduk sebanyak 31 juta jiwa dalam rentang waktu 35 tahun, kemudian pada tahun 1957 Presiden Soekarno menambahkan target transmigrasi sebanyak 49 juta jiwa, tetapi keadaan politik sosial dan ekonomi pada masa itu sedang dalam keadaan yang tidak stabil karena sebagai pemerintahan yang baru, tentunya mengalami kendala seperti sedikitnya aparatur negara dan pendanaan program

transmigrasi yang masih terbatas sehingga dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala (Silahudin, Firmansyah, and Putri 2023).

Setelah masa kepemimpinan orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berakhir, akhirnya masuk kepada masa transisi pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan orde baru transmigrasi tidak hanya ditujukan kepada pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lain, tetapi ada tujuan lain yang tak kalah penting yaitu terlaksananya swasembada pangan dengan tiap-tiap daerah tujuan transmigrasi dapat memproduksi bahan pokok pangan berupa beras (Arisaputra and SH 2021). Penyelenggaraan transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata serta tumbuhnya daerah dan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi membuka kesempatan bagi penduduk dari daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan juga menetap guna meningkatkan kesejahteraannya. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk sekitarnya. (Rustiadi and Junaidi 2011)

Pasal 4 peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973, menjelaskan berdasarkan pelaksanaannya transmigrasi dibagi menjadi transmigrasi umum, Transmigrasi lokal, transmigrasi sisipan, dan transmigrasi bedol desa. Dari jenis Transmigrasi tersebut, Desa Pulau Gadang merupakan jenis Transmigrasi lokal, hal ini di dasari dari penyebaran para transmigran di Desa Pulau Gadang dilakukan dalam satu lingkup provinsi atau wilayah yaitu pemerintah daerah Riau. Transmigrasi lokal merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan oleh seseorang dalam satu lingkup provinsi atau wilayah. Umumnya, proses transmigrasi ini akan dilakukan secara massal atas dukungan biaya dari pemerintah. Pindahannya bersifat setempat, misalnya dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan bahkan mungkin terjadi dalam satu provinsi. Transmigrasi lokal yang terjadi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar ini di latarbelakangi oleh adanya pembangunan Dam PLTA Koto Panjang (Milik PLN). (Intan 2023)

Program transmigrasi ini sangat banyak sekali hambatannya dan tidak mudah untuk meyakini

masyarakat Desa Pulau Gadang terhadap pembangunan Dam PLTA Koto Panjang ini. Sehingga tahun 1990 Rekayasa sosial ke II terjadi lagi dengan adanya kebulatan tekad di desa Pulau Gadang. Kebulatan tekad ini dibacakan oleh Datuok Tandiko Pemuka Adat Desa Pulau Gadang. Acara yang diawali dengan peyerahkan sebilah keris oleh salah seorang pucuk adat XIII Koto Kampar kepada Gubernur Riau yaitu bapak Soeripto, kemudian pucuk adat yang lain memberikan Lambang Adat dan Miniatur Perahu kepada Bupati Kampar bapak Saleh Djasit dan Kepala Proyek Dam PLTA Koto Panjang bapak Tunjung Wicaksono. Salah satu diktum penting yang termaktub dalam kebulatan tekad tahun 1983 di Batu Bersurat dan Pulau Gadang tanggal 9 Oktober 1990 adalah bahwa syarat pemindahan harus meliputi seluruh masyarakat yang ada di suatu desa dan di tempatkan di sekitar pinggiran danau. Kemudian, penempatan kembali harus secara kolektif mutlak harus dilakukan agar masyarakat dapat mempertahankan adat dan tradisi mereka.

Akhirnya pada tanggal 31 agustus 1992 Program transmigrasi ini dimulai, dari 10 Desa yang terkena dampak pembangunan ini Desa Pulau Gadang adalah desa yang pertama kali di pindahkan. Masyarakat Pulau Gadang Mulai dipindahkan ke lokasi pemukiman baru yaitu di daerah Silam, Koto Ranah. Dipemukiman yang baru nama yang digunakan masih tetap sama di Desa yang lama yaitu Desa Pulau Gadang, Desa Pulau Gadang adalah Desa yang terkena dampak paling parah akibat pembangunan waduk PLTA Koto Panjang ini, karna posisi bendungan PLTA ini tepat berada di Desa Pulau Gadang yang lama. Dengan adanya transmigrasi yang dialami masyarakat Desa Pulau Gadang ini memberi dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pulau Gadang, masyarakat harus memulai membentuk berbagai macam bidang dalam menjalani kehidupan. Diantaranya memulai menanam tumbuhan baru, merenovasi rumah, dan menciptakan usaha-usaha demi kelangsungan hidup pada lingkungan baru. Melalui program-program pemerintah Transmigrasi disalurkan bantuan-bantuan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Pada saat itu masyarakat Desa Pulau Gadang yang mengikuti transmigrasi ini berjumlah 417 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial yang bernama Bapak M. Taher. (Anugrah 2022)

Pada tahun 1999 terjadilah pemekaran desa di desa Pulau Gadang. Desa Pulau Gadang dibagi

menjadi dua yaitu Desa induk Pulau Gadang dan Desa Koto Masjid. Namun secara wilayah hukum adat tetap satu Kenegarian yang bernama Kenegarain Pulau Gadang yang di Pimpin oleh seorang Pucuk Pimpinan adat atau Pucuk Adat yang bergelar Datuk Tandiko. Hal ini yang menjadi batasan tahun atau peristiwa yang mengakhiri penelitian yang akan di tulis.

Dari penjelasan pada latarbelakang diatas, penulis melihat adanya pengaruh transmigrasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Pulau Gadang dan juga bagaimana sejarah transmigrasi ini hingga proses berjalannya transmigrasi. Transmigrasi ini sangat menarik untuk di teliti lebih lanjut oleh karenanya maka penulis tertarik untuk menjadikan suatu penelitian skripsi berjudul "*Sejarah Transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999)*".

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu cara untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan intensif dari penelitian ilmiah agar mencapai hasil yang optimal, apabila sebuah ilmu tidak mempunyai metode, maka ia tak layak disebut sebagai ilmu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah (metode historis). Menurut Louis Gottschalk yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah) sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia (Kuntowijoyo 2005).

Metode sejarah dapat juga diartikan sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu berdasarkan data yang diperoleh. Penggarapan sejarah menggunakan metodologi adalah hal yang mutlak, jika tidak penulis akan terjebak pada karya sejarah yang bersifat naratif. Menurut kuntowijoyo, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penulis dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, tahapan-tahapan tersebut antara lain heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan tahap yang terakhir adalah historiografi (penulisan sejarah) (Nina Herlina 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar belakang terjadinya transmigrasi di Desa Pulau Gadang

Salah satu faktor penyebab terjadinya transmigrasi yaitu adanya program pengembangan daerah-daerah permukiman baru yang relatif jarang penduduknya, Meratakan persebaran penduduk agar seimbang di setiap wilayah dan mendorong pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih baik guna tujuan pembangunan. Namun terjadinya transmigrasi bukan hanya saja disebabkan oleh kepadatan penduduk dan kurangnya lapangan kerja, faktor terjadinya transmigrasi bisa disebabkan karena daerahnya terkena proyek pembangunan. Contohnya, pembangunan waduk yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

ODA (*Official Development Assistance*) adalah salah satu alat diplomasi terpenting Jepang, dan negara Indonesia adalah sebagai salah satu negara mitra pembangunan Jepang yang telah mendapatkan manfaat dari ODA sejak lama. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, pemerintah Jepang selama lebih dari 50 tahun telah berkontribusi mendukung Indonesia dalam berbagai bentuk, seperti bantuan aliran dana, teknologi, dan bantuan darurat korban bencana alam. ODA Jepang di Indonesia dimulai sejak tahun 1954 dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi, transportasi, pertanian dan kesehatan. ODA Jepang telah memberikan kontribusi besar di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi Indonesia. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda Asia pada tahun-tahun 1997- 1998, Jepang membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain.

PLN yang tidak mampu meningkatkan tingkat penyediaan listrik di Riau karena tidak tersedia cukup sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pembangkitan, seperti gas alam atau sumber daya panas bumi. Hal ini yang membuat pemerintah mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan listrik di daerah Riau. Akhirnya pemerintah indonesia memutuskan untuk

bekerja sama dengan Jepang untuk membangun bendungan pembangkit listrik. Pada bulan maret 1980 TEPSCO mempresentasikan usulannya ke Pemerintahan Jepang dan Indonesia tentang pembangunan bendungan pembangkit listrik tersebut, dalam presentasinya TEPSCO memberikan 2 usulan kepada pemerintah Indonesia. Pertama, dibangunnya rencana bangunan bendungan sebanyak 2 buah yang berlokasi di Tanjung Pauh dan Koto Panjang. Kedua, dibangun bendungan tunggal berskala besar di lokasi Koto Panjang. Dari hasil pra studi kelayakan ini, TEPSCO menyarankan kepada PLN/ Pemerintah untuk melakukan perbandingan kedua usulan tersebut. Dalam hal ini khusus TEPSCO memiliki kecenderungan akan membangun bendungan tunggal berskala besar di Koto Panjang. Karena dianggap biayanya lebih murah dan kapasitas listrik yang akan dihasilkan jauh lebih besar.

Menanggapi rencana pembangunan PLTA Koto Panjang, pemerintah Indonesia meminta pelaksanaan studi kelayakan harus dilakukan untuk mengetahui apakah layak dibangun atau tidak. Akhirnya Juni 1981 Studi kelayakan ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dan kerusakan alam akibat dari pembangunan waduk tersebut, studi kelayakan ini dilaksanakan oleh TEPSCO memakan waktu dari Januari 1982 hingga Maret 1984, dan dari studi ini disimpulkan bahwa proyek tersebut dapat dilaksanakan. Studi ini juga dalam rangka memperbandingkan rencana bendungan tunggal dengan dua bendungan bertahap. Bendungan tunggal, lokasi di Koto Panjang, kapasitas kekuatan listrik mencapai 114 MW, tinggi bendungan 58 meter. Yang akan menenggelamkan 2.6444 rumah, 8.989 ha kebun-sawah, jalan negara 25,3 km dan jalan propinsi 27,2 km Dua bendungan bertahap, bendungan I lokasi Tanjung Pauh, kapasitas 23 MW, tinggi bendungan 38 meter. Bendungan II lokasi di Koto Panjang, kapasitas 41 MW, tinggi bendungan 30,5 m. Dari studi kelayakan tersebut, kedua bendungan ini akan menenggelamkan rumah sebanyak 390 buah, 1.860 ha sawah dan kebun dan jalan negara sepanjang 16 meter.

Berdasarkan studi ini akhirnya diputuskan untuk membangun Bendungan tunggal skala besar dengan pertimbangan biaya lebih murah sedangkan kapasitas listrik yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan dua bendungan bertahap. PLN kemudian

memutuskan untuk membangun PLTA Kota Panjang yang berskala besar (114 Megawatt) dengan dana sekitar sekitar 700 miliar Rupiah pada waktu itu dengan memanfaatkan sumber daya air di Riau dan memenuhi kebutuhan listrik penduduk di provinsi tersebut. PLN juga merencanakan persiapan kabel listrik yang menyambungkan PLTA Koto Panjang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau untuk mengirimkan listrik yang dihasilkan PLTA tersebut atau listrik yang tersisa di Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Riau sehingga keseimbangan permintaan dan penawaran listrik di kedua daerah terjaga. Keputusan PLTA ini berdasarkan saran dari TEPSCO (Tokyo Electric Power Services Corporation) yang nanti akan menjadi pembangun PLTA tersebut.

Lewat studi tersebutlah tujuan proyek ini ditentukan, yaitu memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta memperbaiki standar kehidupan penduduk dengan meningkatkan saran kelistrikan di kedua daerah tersebut. Namun setelah studi kelayakan selesai, sering muncul protes mengenai proyek ini dari penduduk di kedua daerah. Masyarakat Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tidak setuju dengan pembangunan bendungan ini mengingat dampak negatif yang kelak akan dihasilkan. Media Jepang juga memberitakan kepada publik adanya kemungkinan kerusakan lingkungan berkaitan dengan proyek Kota Panjang sehingga mengundang suatu tim swasta untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Tim ini kemudian meminta pemerintah Jepang untuk menghentikan sementara pinjaman untuk pelaksanaan proyek PLTA Kota Panjang. Permintaan tim ini menimbulkan perdebatan di Jepang tentang apakah proyek ini harus dilanjutkan atau dibatalkan. Menanggapi ini pemerintah Jepang mengirim tim riset OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) ke lapangan untuk kembali melaksanakan studi kelayakan apakah pembangunan ini tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Hasil studi kelayakan kedua ini menyimpulkan bahwa proyek Koto Panjang dapat dilaksanakan.

Setelah melalui perundingan dan kesepakatan yang panjang, akhirnya seluruh desa dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini sepakat untuk di pindahkan ke daerah yang baru. Pembangunan proyek Kota Panjang kemudian dimulai seiring dengan pemindahan secara bertahap

penduduk di sekitar lokasi ke pemukiman baru. Jumlah penduduk yang dipindahkan ke pemukiman baru (Project Affected Familied sebesar 4886 keluarga di 10 desa. TEPSCO yang berperan dari awal proyek ini direncanakan dikontrak lagi untuk menjadi pengawas proyek, sementara untuk pembangunan bendungan dipegang oleh Hazama Corporation. Proyek ini mencanangkan pembangunan bendungan dengan tinggi 58 meter dan panjang 258 meter, yang kelak akan merendam wilayah seluas 124 kilometer persegi dengan target energi listrik 114 MW.

Peristiwa di atas adalah latar belakang yang menyebabkan transmigrasi yang dialami oleh masyarakat Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar. Transmigrasi ini tidak akan terjadi jika tidak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PLN yang berguna untuk menstabilkan dan mencukupi sumber listrik di Provinsi Riau.

2. Proses berjalannya Transmigrasi di Desa Pulau Gadang

Transmigrasi bukanlah sekedar perpindahan manusia sebagai perorangan atau keluarga, transmigrasi merupakan salah satu usaha konkrit dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan mengingat segi-segi kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, swadaya, swakarsa dan swasembada masyarakat.

Desa Pulau Gadang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Pulau Gadang merupakan salah satu dari 10 Desa yang mengikuti program transmigrasi lokal yang di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Desa Pulau Gadang adalah Desa yang pertama dari 10 Desa yang melakukan transmigrasi, dan posisi Desa Pulau Gadang yang lama adalah titik dimana akan dibangunnya waduk PLTA Kota Panjang. Proses berjalannya Transmigrasi di Desa Pulau Gadang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh pemerintah pada saat itu. Dengan diadakannya rekayasa sosial pertama pada tahun 1983 di Batu Bersurat dengan penggalangan masa dengan jargon Kebulatan tekad, bertempat di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Batu Bersurat yang dilakukan atas nama Masyarakat XIII Koto Kampar yang siap berkorban untuk

mewujudkan pembangunan Dam Koto Panjang menghasilkan bahwa masyarakat sebagian besar menolak dan ragu dengan pembangunan PLTA ini. Sehingga Pada 09 Oktober 1990 Rekayasa sosial kedua terjadi lagi dengan adanya kebulatan tekad di Desa Pulau Gadang. Kebulatan tekad ini dibacakan oleh Datuok Tandiko Pemuka Adat Desa Pulau Gadang dan di saksikan oleh kepala adat dari masing-masing desa, serta masyarakat dan pemerintah kabupaten kampar dan pemerintah provinsi Riau.



Gambar 1. Musyawarah kebulatan tekad di Desa Pulau Gadang

(sumber: dokumentasi pribadi armansyah)

Acara yang diawali dengan peyerahkan sebilah keris oleh salah seorang pucuk adat XIII Koto Kampar kepada Gubernur Riau Soeripto, kemudian pucuk adat yang lain memberikan Lambang Adat dan Miniatur Perahu kepada Bupati Kampar Saleh Djasit dan Kepala Proyek Koto Panjang Tunjung Wicaksono. Salah satu diktum penting yang termaktub dalam kebulatan tekad pertama tahun 1983 di Batu Bersurat dan kebulatan tekad ke dua di Pulau Gadang tanggal 9 Oktober 1990 adalah bahwa syarat pemindahan harus meliputi seluruh masyarakat yang ada di suatu desa dan di tempatkan di sekitar pinggiran danau. Kemudian, penempatan kembali harus secara kolektif mutlak harus dilakukan agar masyarakat dapat mempertahankan adat dan tradisi mereka agar tidak punah dan tenggelam bersamaan dengan Tenggelamnya desa mereka. Acara ini dihadiri oleh seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar yang terkena dampak dari pembangunan waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang.

Masih banyaknya masyarakat dan kepala adat yang ragu akan proyek ini sehingga ketika pada pelantikan Bupati Kampar Saleh Djasit yang kedua kalinya pada tanggal 03

April 1991 oleh Soeripto Gubernur Riau. Dalam pelantikan Saleh Djasit ini Soeripto mengingatkan agar persiapan pelaksanaan pembangunan proyek listrik tenaga air Koto Panjang terus dilaksanakan dan tidak boleh berhenti karena kehadiran proyek itu merupakan perjuangan yang cukup panjang sejak tahun 1979. Kehadiran proyek ini akan dapat mengubah wajah Kabupaten Kampar kearah yang lebih cerah. Manfaat lain dari proyek ini akan mampu mendorong pembangunan industri, seperti pabrik kelapa sawit, kayu lapis dan industri hilir lainnya yang akan membawa dampak positif terhadap masyarakat kampar dan masyarakat provinsi Riau.

Pada saat pelantikan Saleh Djasit menjadi bupati Kampar yang kedua kalinya, kepala adat dan masyarakat tidak kunjung juga percaya dan masih ragu terhadap pemerintah dengan pembangunan ini, Mereka tidak yakin sungai kampar yang besar ini tidak bisa di bendung. Hingga akhirnya pada tanggal 24 april 1991 Ir. Syahril Amir Pimpinan Proyek Induk Pembangkit Jaringan (Pikitrang) PLN Sumbar-Riau menyatakan adanya rencana untuk melakukan studi banding ke Cirata dan Saguling di Jawa Barat itu diberikan untuk 150 orang pimpinan masyarakat. Studi banding ini dilakukan agar masyarakat yang di wakili oleh pimpinan masyarakat atau adat percaya dan tidak ragu lagi bahwasanya pemerintah juga bisa membangun waduk seperti yang di jawa.



Gambar 2. Beberapa perwakilan Desa Pulau Gadang yang ikut studi banding ke Jawa Barat

(sumber: dokumentasi pribadi armansyah)

Setelah adanya kesepakatan antara tokoh masyarakat dan pemerintah, membuat langkah mulus bagi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PLN dan pihak Jepang yang diwakili oleh TEPSCO, agar secepat mungkin membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ini. Hingga pada akhirnya Pada 31 Agustus 1992 Program Transmigrasi ini

dilakukan oleh pemerintah, Desa Pulau Gadang adalah desa yang pertama kali di pindahkan. Masyarakat Pulau Gadang akan dipindahkan ke lokasi pemukiman baru di daerah Silam, Koto Ranah. Sebelum dipindahkan, Pemerintah setempat mengumumkan agar masyarakat melaporkan aset kekayaannya maupun lahan yang di miliki oleh masyarakat, bahkan tumbuhan yang ditanam pun akan di ganti oleh pemerintah. Pemerintah juga menghimbau agar semua aktivitas pembukaan lahan baru dan pembangunan yang baru harus dihentikan karna desa ini akan tenggelam oleh air.

Seluruh aset kekayaan dan lahan sudah di hitung dan diserahkan ke pemerintah agar di ganti rugi. Masyarakat Desa Pulau Gadang secara berangsur-angsur di pindahkan ke pemukiman baru, masyarakat juga membawa barang-barang mereka yang sekiranya bisa di bawa dan digunakan di pemukiman yang baru. Masyarakat Desa Pulau Gadang yang ada di seberang sungai kampar juga mulai mengangsur barang-barangnya dengan menggunakan sampan, dan nantinya akan diangkat menggunakan truk untuk dapat membawa barangnya ke pemukiman yang baru.

Transmigrasi masyarakat Desa Pulau Gadang ini tidak semudah yang dibayangkan oleh pemerintah, medan yang terjal dan jalan yang licin membuat pemindahan ini memakan waktu selama 2 minggu lebih. Ditambah lagi masih minimnya kendaraan pengangkut barang serta banyaknya barang yang di bawa juga menyulitkan ketika pemindahan ini. Ditambah lagi ada sebagian masyarakat yang tinggal diseberang sungai kampar sehingga mereka harus mengangkut barangnya menggunakan sampan. Masyarakat Desa Pulau Gadang yang mengikuti transmigrasi ini berjumlah 417 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial yang bernama Bapak M.Taher. Sebelum masyarakat desa Pulau Gadang di pindahkan ke pemukiman baru, pemerintah sudah membangun rumah untuk masing-masing kepala keluarga dengan bahan bangunan semi permanen sehingga ketika mereka pindah ke pemukiman baru tidak repot-repot lagi membangun rumah.

3. Dampak Transmigrasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pulau Gadang

a) Dampak transmigrasi terhadap bidang bidang sosial.

1) Pendidikan

Pengaruh Transmigrasi terhadap pendidikan di Desa Pulau Gadang sangat memberi dampak positif terhadap masyarakat setempat, sebelum diadakannya program transmigrasi pendidikan di desa yang lama masih sangat rendah dan jauh dari kata layak. Di daerah pemukiman baru ini pemerintah membangun fasilitas pendidikan yang telah dibangun sebelum datangnya masyarakat transmigrasi. Kepedulian Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap masyarakat dibuktikan dengan dibangunnya fasilitas pendidikan yang sangat memadai untuk memajukan masyarakat transmigrasi di Desa Pulau Gadang seperti SD 01 Desa Pulau Gadang dan MTs Syekj ja'far yang merupakan sekolah yang awalnya berada di pemukiman yang lama. Hingga datangnya program transmigrasi ini sekolah tersebut pun di ganti rugi oleh pemerintah dan dibangun sekolah yang baru dan sangat layak dibandingkan di tempat pemukiman yang lama.

2) Kesehatan

Program transmigrasi pada umumnya pasti akan memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang mengalami transmigrasi tersebut, Desa Pulau Gadang adalah salah satu desa transmigrasi akibat dari pembangunan waduk PLTA koto panjang. Akibat dari pembangunan waduk tersebut masyarakat harus memulai kehidupan baru dipemukiman yang baru guna untuk melanjutkan hidupnya. Transmigrasi di Desa Pulau Gadang memberi dampak hal positif terhadap aspek kesehatan masyarakat pulau gadang, di pemukiman yang lama infrastruktur kesehatan masih sangat kurang dan jauh dari kata layak. Dengan adanya program transmigrasi ini, kini masyarakat Desa Pulau Gadang sudah tidak khawatir lagi terhadap kesehatan mereka. Pemerintah memberi bantuan ganti rugi dan membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan

disediakan juga tenaga medis di daerah tersebut. Hal ini sangat membantu masyarakat desa pulau gadang.

3) Adat Istiadat

Program transmigrasi di Desa Pulau Gadang secara umum memberi sedikit perubahan terhadap adat istiadat pada masyarakat Pulau Gadang. Perubahan ini dapat lihat pada salah satu fungsi mamak (pucuk adat), di pemukiman yang lama mamak(pucuk adat) menguasai tanah ulayat. Tanah ulayat terdiri dari hutan basah (rawa) dan hutan kariang(hutan kering). Setelah dengan diadakannya transmigrasi ini mamak (pucuk adat) tidak memiliki tanah ulayat lagi. Fungsi mamak (pucuk adat) dalam hal ini dapat kita ketahui yaitu apabila ada kemanakan (anak dari adik atau kakak perempuan atau satu marga) dengan marga yang sama dengan mamak, biasanya mamak (pucuk adat) menanyakan keahlian kemanakan-nya tersebut seperti bisa kesawah atau berkebun. Jika seandainya kemanakan tersebut bisa kesawah maka mamak (pucuk adat) akan meminjamkan sebidang tanah untuk dikelola oleh kemanakan tersebut, dan apabila tanah tersebut tidak dikelola lagi maka tanah tersebut akan kembali ke mamak(pucuk adat).

4) Lingkungan sosial dalam pertanian

Akibat dilakukannya program transmigrasi pada tahun 1992, masyarakat Desa Pulau Gadang harus memulai kehidupan sosial dalam pertanian yang baru. Lingkungan yang baru mempengaruhi pola pertanian yang ada di pemukiman baru, kondisi tanah yang tidak cocok untuk digunakan sebagai petani yang menanam padi membuat masyarakat harus mengandalkan sektor pertanian lain seperti petani karet, petani sawit dan peternak ikan patin. Ditempat pemukiman yang lama sebagian besar masyarakat mengandalkan sektor pertanian seperti petani padi, petani karet dan petani kelapa.

b) Dampak Transmigrasi terhadap perekonomian masyarakat Desa Pulau Gadang

Desa Pulau Gadang adalah salah satu desa yang merupakan desa transmigrasi

lokal yang diakibatkan dengan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, yang mengakibatkan desa mereka tenggelam. Transmigrasi di Desa Pulau Gadang dimulai pada tahun 1992. Pada dasarnya transmigrasi pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Pulau Gadang, salah satunya di bidang perekonomian. karna mata pencarian di pemukiman yang lama berbeda dengan di pemukiman yang baru. Namun transmigrasi di Desa Pulau Gadang ini memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, awalnya di pemukiman yang lama mereka sebagian tidak memiliki lahan, dengan transmigrasi ini masyarakat diberi lahan seluas 2 hektar perkepala keluarga yang sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Pulau Gadang.

Pada tahun 1993 bupati Kampar yaitu Shaleh Djasit menghadiri dan memantau pemukiman transmigrasi di Desa Pulau Gadang, tampak masyarakat bahagian dan merasa nyaman di pemukiman yang baru ini. Pemerintah kampar juga selalu memperhatikan seluruh aspek baik itu kesehatan ,keamanan dan keadilan agar masyarakat Desa Pulau Gadang merasa betah dan nyaman di pemukiman yang baru ini.

Setelah satu tahun dipemukiman yang baru tepatnya tahun 1993 salah satu menteri transmigrasi Siswono Yudohusdo beserta rombongan mengunjungi masyarakat transmigrasi di Desa Pulau Gadang, mereka melihat banyaknya antena parabola yang bertengger diatas rumah transmigran sehingga dapat dikatakan desa pulau gadang adalah pemukiman transmigrasi yang kaya dibandingkan pemukiman transmigrasi lainnya. Masyarakat sangat beruntung, biaya yang diperoleh penduduk desa Pulau Gadang ini berjumlah Rp. 6,2 milyar dan masyarakat juga diberi lahan masing-masing 2 hektar. Hasil uang ganti rugi tersebut banyak digunakan masyarakat untuk merenovasi rumah dipemukiman baru, ada juga yang membeli motor, mobil, antena tv, dan alat untuk karaoke.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Desa Pulau Gadang merupakan salah satu desa yang berada dikabupaten Kampar,

Provinsi Riau. Desa Pulau Gadang adalah salah satu dari 10 desa yang terkena dampak pembanguna Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Dengan adanya pembangunan ini masyarakat Desa Pulau Gadang harus merelakan kampung halaman-nya dan mengikuti program dari pemerintah yaitu program transmigrasi. Program transmigrasi tidaklah berjalan dengan mulus seperti yang dibayangkan oleh pemerintah, pemerintah dan juga masyarakat telah melaksanakan rekayasa sosial sebanyak 2 kali guna untuk meyakinkan masyarakat yang terkerna dampak pembangunan PLTA ini. Akhirnya pada tahun 1992 program transmigrasi ini dilakukan oleh pemerintah, dan desa pulau gadang adalah desa yang pertama dipindahkan kepemukiman baru yang berada di Silam, Koto Ranah. Pada saat itu masyarakat pulau gadang berjumlah 417 KK dan dalam proses transmigrasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial yang bernama Bapak M. Taher.

Transmigrasi di Desa Pulau Gadang memberi dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dampak yang dialami masyarakat Desa Pulau Gadang pada umumnya memberi dampak positif. Seperti di bidang sosial, kehidupan sosial masyarakat Desa Pulau Gadang menjadi lebih baik dan lebih maju dibandingkan dipemukiman yang lama, contohnya sarana pendidikan yang lebih memadai dibanding kampung yang lama, hingga sarana tempat ibadah dan kesehatan yang sangat layak. Tidak hanya di bidang sosial saja di bidang ekonomi juga dialami oleh masyarakat desa pulau gadang. Dalam bidang ekonomi transmigrasi memberi dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat, meskipun pada awalnya masyarakat pada ragu dan tidak yakin bisa hidup dipemukiman yang baru. Kehidupan ekonomi masyarakat pulau gadang dipemukiman baru kini menjadi lebih baik dibandingkan dipemukiman yang lama, seperti pada dipemukiman yang lama mayoritas masyarakat desa pulau gadang bermata pencarian sebagai petani karet dan nelayan. Kini dipemukiman yang baru masyarakat bekerja seperti petani karet, petani sawit dan peternak ikan patin yang membuat perekonomian masyarakat meningkat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada masyarakat Desa Pulau Gadang agar terus mengingat dan tidak melupakan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Agar anak-anak penerus desa tersebut tidak lupa dengan identitasnya.
2. Peneliti berharap kepada masyarakat Desa Pulau Gadang dan pemerintah Kabupaten Kampar agar membuat sebuah tugu atau simbol agar masyarakat luas tahu bahwasanya desa tersebut merupakan desa yang bersejarah dan desa transmigrasi akibat pembangunan PLTA Koto Panjang.
3. Peneliti berharap agar pemerintah selalu memperhatikan desa-desa yang merupakan desa ekstran transmigrasi agar kehidupan masyarakatnya lebih baik lagi. Karena mereka telah berkorban untuk negara ini agar masyarakat Riau dapat menikmati listrik yang cukup. Dan saran juga agar pemerintah harus berlaku adil dan bertanggung jawab apabila dalam melakukan program transmigrasi.

DAFTAR RUJUKAN

Album Koran Dharmasena No.05 tahun 1993

Arsip Pemerintah Arsip Desa Pulau Gadang

Kecamatan XIII Koto Kampar Dalam Angka Tahun 1992

Kecamatan XIII Koto Kampar Dalam Angka Tahun 1993

Kecamatan XIII Koto Kampar Dalam Angka Tahun 1998

Jalan ke Koto Panjang (Kronologi tahun 1979-2000)

Abdurahman, Dudung.(2021), *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak.

Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, And Ujud Rusdia.(2018), *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.

Arisaputra, Muhammad Ilham, And M Kn Sh.(2021), Siswono Yudohusudo. Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran Yang Timpang. (

Jakarta: Pt Jurnal Aksara Grafika, 1998). Hlm 72. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Devi Indriani.(2019), "Menyoal Ecocide Di Provinsi Riau Studi Kasus Pembangunan PLTA Koto Panjang." *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Riau - Walhi Riau*.

H.J. Heeren. (1979), *Transmigrasi Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia.

Iskandar, A Halim. (2020), *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kuntowijoyo, D R.(2005), *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

L J Moleong.(2017), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Levang, Patrice.(2003), *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi Di Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Majid, Abdul.(2017), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.

Madjid, M Dien, And Johan Wahyudhi.(2014) *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Kencana.

Mustari, Muhamad, And M Taufiq Rahman. (2012), "Pengantar Metode Penelitian." Laksbang Pressindo.

Nursapia Harahap. (2020), *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Octaviani, Rika, And Elma Sutriani.(2019), "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data".

Nina Herlina.(2020), *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.

Rukajat, Ajat. (2018), *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.

Rukmana, Arief Yanto, Rakhmadi Rahman, Hery Afriyadi, Dikwan Moeis, Zunan Setiawan, Nur Subchan, Lena Magdalena, Marcello Singadji, Augury El Rayeb, And Agus Tommy Adi Prawira Kusuma. (2023), *Pengantar Sistem Informasi: Panduan Praktis Pengenalan Sistem Informasi &*

- Penerapannya. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sulasman. (2014), *Metode Penelitian Sejarah Teori Metode Contoh Aplikasi*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Sim, L.H. (2001), *Peranan Jepang Di Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiadi, Elly M, and Usman Kolip. (2013), *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana.
- Suryono, Agus.(2020), *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Yudohusudo, Siswono. (1998), *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran Yang Timpang*. Jakarta: Pt Jurnal Aksara Grafika.
- Yulmardi, Yulmardi.(2019),*"Transmigrasi Di Provinsi Jambi (Kesejahteraan Dan Sebaran Permukiman Generasi Kedua Transmigran)." Cv. Pena Persada*
- Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, And K H M Zakariah.(2020), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Handoko, Tri. "Peran Masyarakat Transmigran Terhadap Perkembangan Wilayah Di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar (Studi Kasus: Desa Suka Makmur)." Universitas Islam Riau.2022.
- Hasan, Renol, Sutrisno Mohamad, Andris K Malae, And Fikriyanto R Latif. "Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa Di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto." *Dynamics Of Rural Society Journal* 1, No. 1 hlm. 32-41,2023.
- Kamarullah, Amril. "Diaspora Masyarakat Buton Di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan 1925-1974." Universitas Khairun.2021
- Rustiadi, Ernan, And Junaidi Junaidi. "Transmigrasi Dan Pengembangan Wilayah." Hlm. 25, 2011.
- Saputra, Anggi. "Sejarah Dan Eksistensi Yayasan Al-Fida Di Kota Bengkulu Tahun 1991-2018." Iain Bengkulu,2020.
- Wawancara dengan Datuk Veto Majo Darumin Tengku sebagai tokoh masyarakat yang ikut dalam studi banding ke Jawa Barat untuk melihat waduk Cirata dan Saguling.
- Wawanacara dengan Datuk Paduko Dasril selaku tokoh adat dan saksi sejarah peristiwa transmigrasi di Desa Pulau Gadang
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafii selaku masyarakat yang menyaksikan dan pelaku sejarah dalam transmigrasi tersebut.